

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alder, John, and David Wilkinson. *Environmental Law and Ethics*. Basingstoke: MacMillan Press, 1999.
- Fauzi, Noer. *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. Cetakan kedua. Yogyakarta: INSISTPress, 2017.
- Gunanegara, *Tanah Terlantar Melanggar Hukum, Catatan Sejarah Hukum, Latar Belakang, dan Penegakan Hukum, Penertiban Tanah Terlantar*, Gunanegara, Jakarta. 2020.
- Harsono, Budi, ed. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. 14., ed. Rev. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Malang: Setara Press, 2024.
- Ismail, Nurhasan, Rikardo Simarmata, Rafael Edy Bosko, Maria S. Sumardjono, Genta Publishing, and Universitas Gadjah Mada, eds. *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono*. Cetakan pertama. Bulaksumur Law Series. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing bekerjasama dengan Unit Riset Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Isnaeni, Diyan, and Suratman. *Reforma Agraria: Land Reform Dan Redistribusi Tanah Di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda, 2007.



- Jaya, I Nyoman Budi. *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Limbong, Bernhard. *Opini Kebijakan Agraria*. Jagakarsa, Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka, 2014.
- Parlindungan, A. P. *Landreform di Indonesia: strategi dan sarannya*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 14. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.
- Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Shohibuddin, Moh. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, Dan Kajian Empiris*. Sleman: STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Pusat Studi Agraria IPB, [dan] Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018.
- Sodiki, Achmad. *Politik Hukum Agraria*. Cetakan pertama. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Soetiknjo, Iman. *Politik agraria nasional*. Cet. 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.



- . *Proses terjadinya UUPA: peran serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Cet. 6. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Sugianto, Fajar. *Economic Approach to Law Edisi 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Wicaksono, Arditya, and Agus Jatmiko. *Kajian Kebijakan Penertiban Tanah Atau Kawasan Tanah Terlantar*. Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press, 2020.

### **Peraturan dan Putusan**

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 114 Tahun 2002
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6632



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, Berita Negara Republik Indonesia No. 813 Tahun 2021  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003, dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004.

### Jurnal

Afinnas, Muhamad Agil Aufa. “Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title Di Australia.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (June 3, 2022): 139.  
<https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2316>.

———. “Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia.” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (June 27, 2023).

Akhmad Rudi Maswanto and Ahmad Khoirul Anam. “Nalar Hukum Prismatic Dalam Konteks Hukum Nasional.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (December 29, 2021): 50–64.  
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.685>.

Andjarwati, Any. “Tuntutan Penguatan Pertanian Di Pinggiran Kota Sebagai Kawasan Perkotaan.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021).

- Binawan, Al. Andang, and Tanius Sebastian. *Menim(b)Ang Keadilan Eko-Sosial, Kertas Kerja Epistema No. 07/2012*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- Bosko, Rafael Edy. “Fungsi Sosial: Konsepsi Dan Implikasi Pengaturannya Terhadap Hak Milik Atas Tanah.” *Mimbar Hukum*, n.d.
- . “Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview.” *The 9th ALIN Expert Forum, Land Rights Law in Asian Countries*, 2014.
- Demsetz, Harold. “Toward a Theory of Property Rights.” *The American Economic Review* 57, no. 2 (1967).
- Hamseng. “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dan Mewujudkan Kemandirian Di Bidang Pangan Di Kabupaten Gunungkidul.” Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Ilmiawan. “Analisis Faktor Penyebab Tanah Terlantar Di Daerah Transmigrasi Desa Waode Angkalo Kabupaten Buton Utara.” Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Nurman A.S. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Tanah-Tanah Terlantar: Studi Kasus Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.” Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Pasambuna, Afra Fadhillah Dharma. “Implementasi Hak Pengelolaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.” *Lex Et Societatis* 5, no. 1 (2017).
- Paurindra E, Mohammad. “Penertiban Tanah Terlantar Di Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.” Universitas Gadjah Mada, 2019.



Rahmawati, Sofia. "Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha."

*Prosiding Seminar Nasional Instiper 1*, no. 1 (July 21, 2022): 7–21.

<https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237>.

Ramadhan, Ahsanul Rizky, Firman Muntaqo, and Iza Rumesten. "Penertiban Tanah

Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Dan Pemanfaatan Tanah."

*Repertorium 11*, no. 1 (2022).

Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam."

*Jurnal Konstitusi 12*, no. 2 (2015).

Sembiring, Benny Lala, and Yohanes N Agung Wibowo. "Menghitung Dampak

Tanah Terlantar Terhadap Potensi Kerugian Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal*

*Pertanahan 10*, no. 1 (2020).

Sembiring, Julius. "Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Mimbar Hukum*

- *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23*, no. 2 (June 7, 2011): 394.

<https://doi.org/10.22146/jmh.16185>.

Sibuea, Harris Y. P. "Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar." *Kajian 26*,

no. 1 (2021).

### Internet

CNN Indonesia. "BPN: 1,2 Juta Hektare Lahan RI Terindikasi Terlantar." Accessed

July 10, 2024. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar)

[92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214161122-92-733968/bpn-12-juta-hektare-lahan-ri-terindikasi-terlantar).